

RELASI KUASA DAN HIERARKI SOSIAL DI PESANTREN: FENOMENA FEODALISME DAN GUS-GUSAN

Jati Pamungkas¹, dan Ahmad Rofiq Muzakki²

^{1, 2}. UIN Syekh Wasil Kediri

jatipamungkas@uinkediri.ac.id,¹ zaki04442@gmail.com²

Abstract

This study examines power relations, social hierarchies, and symbolic dynamics within Indonesian pesantren environments, focusing on two central issues: cultural feudalistic practices and the phenomenon of “gus-gusan.” Through a literature review of works published between 2010 and 2025, the research analyzes how the authority of the kiai is constructed through the accumulation of symbolic, social, and cultural capital, as well as how hierarchical structures within pesantren are maintained through adab (ethics) and traditions of ta’zīm (reverence). Drawing on Max Weber’s theory of charisma and the framework of Symbolic Interactionism, this paper highlights that kiai authority is rooted not only in scholarly competence but also in cultural perceptions of charisma, genealogical lineage, and inherited spiritual legitimacy. The study finds that feudalistic tendencies in pesantren do not manifest as political feudalism but rather as patrimonial patterns arising from hereditary leadership, symbolic control, and absolute obedience within the santri community. Meanwhile, the phenomenon of “gus-gusan”, the attribution of the honorary title Gus without genealogical or scholarly basis, emerges as a consequence of modernization, social media, and the commodification of religious symbols. The shifting meaning of the title “Gus” indicates a transformation in the structure of religious legitimacy in the digital age. The findings underscore the importance of repositioning values of adab, scholarship, and accountability so that pesantren can preserve their moral authority while adapting to the demands of modernity. This study contributes to the theoretical understanding of the transformation of religious authority and the dynamics of power within traditional Islamic institutions in the Indonesian archipelago.

Keywords: *Pesantren; Religious Authority; Symbolic Capital; Gus-gusan Phenomenon*

1. PENDAHULUAN

Agama adalah bagian vital dari kehidupan manusia. Okarniatif (2024), menjelaskan bahwa pengaruh dan perkembangan agama memainkan peranan penting dalam dinamika perubahan sosial, budaya, politik, serta tradisi di tengah masyarakat

yang terus bergerak dan berkembang dalam arus zaman. Kedudukan agama dikupas melalui aspek historis dan sosial adalah sebuah produk budaya yang sifatnya universal dan dihasilkan oleh manusia melalui rangkaian panjang proses sejarah dan peradaban yang kompleks (Anjarahmi, Alamin, 2023). Menurut Suhartini (2021), agama bersifat timbal balik dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek yang lebih luas. Sektor agama juga telah memengaruhi peradaban dan kehidupan manusia sejak lama, melintasi ruang sejarah dan pergantian masa, beriringan bersama dengan kehidupan manusia itu sendiri. (Putri, et al, 2023). Menurut Koentjaraningrat, seperti yang diambil dari (Riady, 2021), agama menjadi sebuah konsep dasar dari kebudayaan manusia.

Pengaruh dan kedudukan agama sebagai sarana penyebaran dari nilai-nilai religiusitas dan eksistensinya sebagai media komunikasi ritual antara kekuatan ilahiah yang bersifat transendental dengan kehidupan duniawi yang bersifat sekuler dan profan. Hal ini menjadi alasan mengapa keberadaan agama merupakan bagian yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Khususnya masyarakat dengan budaya dan ritual yang masih kental. Fungsi agama dengan seperangkat nilai-nilai spiritualnya tidak hanya sebatas praktik-praktik ritual semata, tetapi juga menjadi pengikat dari hubungan dan solidaritas antara berbagai unsur di dalam masyarakat. Menurut Émile Durkheim sebagaimana yang diambil dari (Suhartini, R., 2021), manusia-manusia yang merasa dirinya disatukan dengan suatu komunitas kepentingan yang sama cenderung berkumpul dan menyadari kesatuan moral mereka, dan agama-agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial. Karena itu, fungsi sosial agama adalah mendukung dan melestarikan masyarakat yang sudah ada. Keberadaan agama bukan sekadar sebagai bentuk implementasi dan kepatuhan individu semata terhadap nilai-nilai yang diajarkan dalam tradisi dan budaya keagamaan, tapi juga sebagai pengatur sosial, dalam menciptakan keharmonisan, ketertiban, dan keserasian dalam sistem sosial masyarakat. (Irawan, 2022). Nilai penting agama juga bisa terlihat dalam peranannya dalam membentuk perilaku dan cara pandang yang harmoni dalam bersikap toleran dan saling menghargai terhadap segala perbedaan unsur budaya dalam masyarakat yang beraneka ragam agar tercipta rasa keadilan dan kesejahteraan di tengah diferensiasi sosial yang majemuk (Afriyanto, Anandari, 2023).

Pesantren sebagai institusi pendidikan dan sosial keagamaan di Indonesia menempati posisi sentral dalam reproduksi pengetahuan, simbol moral, dan jaringan sosial umat Islam Nusantara. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa lembaga tersebut berdiri sejak masa prakolonial dan mengalami perkembangan selaras dengan tumbuhnya Islam di Nusantara, hingga kemudian menjadi “sokoguru” pendidikan Islam yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia (Ningsih dkk., 2023). Dalam konteks tersebut, pesantren diposisikan sebagai ruang di mana santri memperoleh ilmu agama dan penguatan nilai moral melalui tradisi pembelajaran klasik (kitab kuning, sorogan, bandongan) sambil menginternalisasi norma sosial keagamaan yang berlaku di komunitas (Silfiana, 2020). Peneliti melihat bahwa melalui fungsi

tersebut, pesantren tidak sekadar menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga menjadi agen transformasi sosial yang membantu meningkatkan status sosial santri dan menghubungkan mereka dengan struktur keagamaan dan sosial yang lebih luas (Assa'idi, 2021). Dengan demikian, keberadaan pesantren mencerminkan integrasi antara pendidikan, spiritualitas, dan pembentukan komunitas yang menjadikannya institusi strategis dalam lanskap pendidikan Islam Indonesia. Struktur relasi antara kiai-kiai (pemimpin pondok), santri, dan unsur lain (keluarga kiai, pengurus, alumni) sering digambarkan melalui metafora hierarki kuat: penghormatan yang tinggi kepada kiai, peranan keluarga kiai sebagai penjaga legitimasi, dan aturan sosial yang mensyaratkan adab (tata krama) tertentu. Dalam beberapa tahun terakhir, dua narasi dominan mengemuka di ruang publik dan akademik. Tuduhan bahwa beberapa praktik pesantren mendekati pola feodalisme, yaitu pengkonsentrasian kekuasaan patrimonial yang menutup ruang kritik dan fenomena gus-gusan, di mana gelar tradisional ("Gus") dipakai atau dipopulerkan tanpa keterkaitan langsung dengan kapabilitas keilmuan atau etika pesantren, sering kali melalui platform media sosial. Kedua isu ini memicu perdebatan intens di kalangan akademisi, organisasi keagamaan, dan publik.

Pada pesantren Indonesia, struktur kepemimpinan kiai-kiai sering diwarnai oleh pola hubungan yang sangat hierarkis dan berbasis pada dominasi simbolik serta budaya senioritas. Sebagai contoh, penelitian menyebutkan bahwa "kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi merefleksikan paling tidak dua model otoritas sekaligus, yakni otoritas karismatik karena kapasitas ilmiahnya dan otoritas tradisional yang diwariskan dari pendahulunya" sehingga "kiai memiliki kekuasaan penuh dalam memformulasikan, menentukan dan mengarahkan wacana serta praktik keagamaan di pondok pesantren" (Pebriaisyah dkk., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa santri berada dalam posisi yang relatif subordinat, karena otoritas kiai-kiai tidak sekadar berdasarkan keilmuan, tetapi juga akumulasi modal ekonomi, budaya, dan simbolik (Haryono, 2023). Konsekuensinya, pembelajaran dan kehidupan sehari-hari di dalam pesantren tidak hanya berlangsung secara akademis, tetapi juga melalui internalisasi norma yang ditetapkan dari atas, termasuk melalui pengasuhan, ritual, dan peraturan tidak tertulis yang digerakkan oleh kiai. Peneliti menemukan bahwa ketidakseimbangan hubungan ini menimbulkan kecenderungan reproduksi struktur sosial yang tertutup, di mana mobilitas dari posisi subordinat menuju posisi pengambil keputusan berlangsung terbatas. Dengan demikian, memahami pesantren sebagai institusi sosial memerlukan analisis yang menyoroti bagaimana otoritas tradisional dan struktur hierarkis, dalam hal ini feodal-kultural, membentuk pengalaman pengetahuan dan kekuasaan di dalam komunitas pesantren.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai pengatur sosial yang sifatnya mengikat masyarakat dalam tata aturan dan norma sesuai dengan konsensus yang ada, salah satunya adalah dengan komponen penggerak atau pelaksana dari tatanan nilai, pengaruh, serta aktivitas, dari institusi agama agar bisa terwujud dengan baik. Oleh

karena itu, sebagai roda pelaksana dari norma dan nilai-nilai dari agama, dibutuhkan peran seorang individu kharismatik dan berpengaruh yang bisa menjalankan fungsi agama secara maksimal serta memantau kondisi keagamaan di tengah masyarakat. (Neliwati, et al, 2022). Untuk itulah, keberadaan tokoh agama sangat krusial dalam memengaruhi berbagai gejolak dan dinamika aktivitas keagamaan di tengah masyarakat.

Kebutuhan untuk melakukan kajian literatur kritis mengenai otoritas feodal dalam lingkungan pesantren Indonesia semakin mendesak, karena literatur terkini menunjukkan bahwa legitimasi institusional dan relasi kuasa keagamaan tidak lagi dapat dipahami secara linier dari tradisi saja. Sebagai contoh, penelitian oleh Moh Ferdi Hasan menemukan bahwa sistem regulasi di pesantren dibangun atas dasar teks-teks keagamaan, otoritas kiai-kiai, dan tradisi berabad-abad, yang berbeda secara mendasar dengan lembaga pendidikan publik yang legitimasi regulasinya dibentuk melalui kebijakan nasional dan birokrasi (Hasan, 2025). Peneliti mencermati bahwa dalam proses tersebut tersebar mekanisme distribusi pengetahuan, kekuasaan simbolik, dan akumulasi modal keagamaan yang mereproduksi pola hierarkis pesantren sebagai institusi tertutup ke dalam ruang publik yang dinamis. Oleh karena itu, memahami otoritas feodal di pesantren tidak cukup hanya dengan menelusuri kepemimpinan kiai-kiai atau struktur kelembagaan, tetapi juga dengan menggali bagaimana modal keagamaan dan pengetahuan dikonstruksi, dijalankan, dan dirundingkan kembali di era modern. Kajian semacam ini diharapkan mampu memberikan kerangka konseptual yang kritis dan memperluas pemahaman akademik tentang perubahan struktur kekuasaan, pengetahuan, dan modal dalam pendidikan pesantren di Indonesia.

Dalam konteks sosiologis, hal ini menuntut analisis yang lebih jelas, apakah penghormatan dan otoritas kiai selalu berarti feodalisme? Bagaimana modal simbolik (legitimasi, nama keluarga, gelar) bekerja bersama modal sosial dan ekonomi dalam mereproduksi hierarki? Bagaimana santri atau aktor lain melakukan negosiasi, resistensi, atau rekonfigurasi kuasa, termasuk melalui praktik dakwah digital yang melahirkan gus-gusan? Teori Max Weber tentang Kharisma dan Interaksionisme Simbolik membantu menjelaskan mekanisme tersebut, sementara kajian empiris terbaru memberi gambaran dinamis tentang adaptasi pesantren di era digital dan modernisasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga sebagai arena sosial yang memproduksi dan mereproduksi relasi kuasa. Menurut Zamakhsyari Dhofier (2011), struktur sosial pesantren dibangun melalui hubungan patronase antara kiai dan santri yang didasarkan pada penghormatan, loyalitas, dan kepercayaan. Posisi kiai sebagai pemegang otoritas tertinggi menempatkannya pada puncak hierarki sosial pesantren. Dalam struktur tersebut, santri berperan sebagai pihak yang menerima dan menjalankan nilai-nilai yang ditransmisikan oleh kiai. Penelitian

Endang Turmudi (2006) juga menunjukkan bahwa otoritas kiai tidak hanya berasal dari kapasitas keilmuan, tetapi juga dari legitimasi sosial yang dibangun melalui jaringan alumni, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dapat dipahami sebagai ruang sosial yang sarat dengan hubungan kekuasaan simbolik dan mekanisme reproduksi status sosial.

Konsep otoritas kharismatik yang dikemukakan oleh Max Weber menjadi salah satu teori utama untuk memahami posisi kiai dalam pesantren. Weber menjelaskan bahwa kharisma merupakan kualitas luar biasa yang diyakini dimiliki seseorang sehingga memperoleh pengakuan dan kepatuhan dari para pengikutnya. Dalam konteks pesantren, kiai dipandang memiliki otoritas karena kedalaman ilmu agama, kesalehan pribadi, serta kemampuan spiritual yang dipercaya masyarakat. Penelitian Fauzi dan Kasno (2023) menunjukkan bahwa kharisma tokoh agama terbentuk melalui persepsi kolektif masyarakat yang menganggap tokoh tersebut memiliki keunggulan moral dan spiritual. Otoritas ini kemudian menghasilkan hubungan yang kuat antara pemimpin dan pengikut sehingga menciptakan pola kepatuhan yang relatif tinggi. Dengan demikian, dominasi kiai dalam pesantren dapat dipahami sebagai bentuk otoritas kharismatik yang memperoleh legitimasi melalui pengakuan sosial dan religius.

Diskursus mengenai feodalisme pesantren muncul dari kritik terhadap adanya pola kepemimpinan yang bersifat patrimonial dan berorientasi pada garis keturunan. Meskipun pesantren tidak identik dengan sistem feodal klasik sebagaimana berkembang di Eropa, beberapa penelitian menunjukkan adanya praktik yang menyerupai feodalisme kultural. Menurut Pebriaisyah dkk. (2022), kiai memiliki otoritas yang sangat besar dalam menentukan kebijakan, arah pendidikan, dan kehidupan sosial santri. Kondisi ini berpotensi melahirkan hubungan subordinatif yang menempatkan santri sebagai pihak yang sulit melakukan kritik terhadap otoritas pesantren. Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1990), fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep modal simbolik yang memungkinkan kelompok tertentu mempertahankan dominasi sosial melalui legitimasi budaya dan keagamaan. Oleh karena itu, feodalisme dalam pesantren lebih tepat dipahami sebagai feodalisme kultural yang beroperasi melalui simbol, tradisi, dan penghormatan terhadap otoritas.

Konsep modal simbolik dari Pierre Bourdieu memberikan kerangka teoretis untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan direproduksi dalam lingkungan pesantren. Bourdieu menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersumber dari faktor ekonomi, tetapi juga dari penguasaan simbol, prestise, dan legitimasi sosial. Dalam pesantren, modal simbolik diwujudkan melalui sanad keilmuan, reputasi keluarga kiai, gelar keagamaan, serta pengakuan masyarakat terhadap kapasitas spiritual seseorang. Haryono (2023) menjelaskan bahwa identitas keagamaan dan status sosial santri maupun kiai terbentuk melalui proses akumulasi modal budaya dan simbolik yang berlangsung secara terus-menerus. Akumulasi modal tersebut memperkuat posisi elit pesantren dan memungkinkan terjadinya reproduksi kekuasaan lintas generasi. Dengan

demikian, keberlangsungan hierarki sosial di pesantren tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh kekuatan simbolik yang diterima sebagai sesuatu yang wajar oleh komunitas pesantren.

Fenomena gus-gusan merupakan gejala sosial yang berkembang seiring transformasi otoritas keagamaan di era digital. Secara historis, gelar "Gus" merupakan sapaan kehormatan yang diberikan kepada putra kiai sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga pesantren dan pewaris tradisi keilmuan Islam (Dhofier, 2011). Namun, perkembangan media sosial telah mengubah makna gelar tersebut. Santoso (2022) menjelaskan bahwa media baru memungkinkan munculnya figur-figur agama yang memperoleh popularitas melalui eksposur digital tanpa harus memiliki legitimasi tradisional yang kuat. Temuan Nurhamidin dkk. (2025) menunjukkan bahwa otoritas keagamaan kini semakin bergeser dari basis genealogis dan keilmuan menuju basis popularitas serta pengaruh media. Akibatnya, gelar "Gus" mengalami perluasan makna dan tidak lagi secara eksklusif merujuk pada keturunan kiai. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi mekanisme legitimasi keagamaan dari otoritas tradisional menuju otoritas digital yang lebih cair dan kompetitif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan desain penelitian kajian pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk meninjau literatur secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengakses, mengevaluasi, dan menyintesis berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema otoritas feodal di pesantren. Sumber-sumber literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal internasional, buku akademik, dan dokumen daring yang telah diverifikasi kredibilitasnya. Seluruh penelitian dikonstruksi dengan kerangka desain yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan objektivitas analisis. Dalam konteks ini, penggunaan pendekatan kualitatif secara pustaka sesuai dengan praktik standar dalam studi ilmu sosial dan agama (Snyder, 2019). Sumber data utama adalah artikel ilmiah, disertasi, laporan institusional, serta liputan media yang relevan antara 2010–2025 (dengan perhatian khusus pada literatur terakhir 3–5 tahun untuk fenomena gus-gusan dan diskursus feodalisme). Proses analisis dilakukan dengan langkah berikut:

1. Pemetaan literatur: pengumpulan artikel dan sumber empiris menggunakan kata kunci: pesantren, kiai, hierarki, feodalisme, gus-gusan, ta'zīm, modal simbolik, habitus, kekuasaan, dan sejenisnya. Hasil pencarian yang relevan ditelaah dan dibaca penuh.
2. Pendekatan teori: pemaknaan hasil kualitatif menggunakan lensa Max Weber (Kharismatik & Interaksionisme Simbolik) dan studi antropologi/sosiologi agama tentang kepemimpinan karismatik dan patronase dalam pesantren.

3. Triangulasi: temuan literatur dibandingkan dengan opini organisasi (mis. PBNU), artikel opini, dan studi empiris untuk memastikan keseimbangan interpretasi.

Keterbatasan: studi ini tidak melakukan riset lapangan primer (wawancara/observasi partisipan) sehingga bergantung pada penelitian terdahulu; oleh karena itu, generalisasi harus dilakukan dengan kehati-hatian dan sebagai dasar untuk studi lapangan mendatang.

Tuliskan metode penelitian yang dilakukan di sini. Penelitian yang dimaksud baik yang dilakukan secara *field research* maupun *library research* (Sugiyono, 2013). Jika artikel merupakan pengembangan atau sempalan dari judul penelitian dan masih menggunakan data yang sama, maka bisa dituliskan metode penelitian pada masalah penelitian induk.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep kuasa, adab, dan *ta'zīm* dalam pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas dalam pesantren Indonesia umumnya terpusat pada figur kiai, yang berperan sebagai pemegang kekuasaan sekaligus pusat pengetahuan. Struktur ini membentuk hierarki yang jelas antara kiai, pengurus, dan santri, sehingga keputusan strategis dan operasional pesantren sangat dipengaruhi oleh kiai. Selain itu, ditemukan adanya praktik feodalisme pendidikan, di mana santri sangat bergantung pada keputusan kiai, termasuk dalam hal akses pendidikan, pembelajaran, dan peluang karier di lingkungan pesantren. Meskipun demikian, fenomena ini tidak selalu bersifat negatif karena juga mendorong kepatuhan dan keteraturan dalam organisasi pesantren. Temuan unik yang muncul adalah bahwa beberapa pesantren mulai mengadaptasi sistem partisipatif untuk santri senior, yang menurunkan ketergantungan penuh terhadap kiai dan membuka ruang negosiasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, status dan kedudukan seorang agamawan atau tokoh agama menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari realitas kehidupan (Bheka, 2024). Manusia bukan hanya makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan hubungan dengan manusia lain, tetapi juga merupakan makhluk spiritual yang tentunya membutuhkan ikatan harmoni dengan kekuatan suci dan adikuasa untuk memperoleh ketenangan dan kedamaian sebagai bagian dari bentuk pemenuhan kebutuhan jiwa. (Dewanti & Sastri, 2022). Dalam mengoneksikan kehidupan sosial manusia dengan dimensi spiritual yang memiliki batas ruang yang abstrak, seorang tokoh agama memiliki peran ganda. Yang pertama, tokoh agama adalah fasilitator yang menghubungkan dimensi religi yang tak kasat mata dengan dimensi kehidupan manusia yang nyata melalui suatu perantara simbol-simbol religi. Yang kedua, tokoh agama adalah pemecah persoalan yang terjadi di saat krisis sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melihat begitu pentingnya arti dari seorang pemuka agama dalam dinamika

kehidupan suatu kelompok masyarakat, tidak mengherankan jika kedudukan sosial seorang tokoh agama atau agamawan menempati bagian yang penting dan istimewa.

Keberadaan seorang tokoh agama di tengah hiruk-pikuk dinamika sosial masyarakat membuktikan akan kuatnya pengaruh dari golongan agamawan dalam lapisan sosial. Kedudukan dan kehadiran seorang tokoh agama memiliki pengaruhnya tersendiri di masyarakat, di mana letak pengaruhnya terdapat pada struktur sosial dan budaya sekitar (Pradana, 2020). Hal ini juga mengindikasikan bagaimana pengaruh hegemoni dan status individu di hierarki sosial, bisa sedemikian besarnya dalam membentuk suatu model masyarakat berbasis kultural dengan menyatukan juga unsur-unsur agama di dalamnya. Sederhananya. Menurut Habibah & Rahmawati (2023), tokoh agama berpegangan pada kekuasaan intelektual dan spiritual yang menjadikan masyarakat menjadikannya sebagai panutan kehidupannya. Sehingga pengaruh tokoh agama jauh lebih dalam dan mengakar pada masyarakat. Otoritas kiai sering dibangun dari kombinasi modal simbolik (ilmu, sanad, garis keturunan), modal sosial (jejaring santri, tokoh masyarakat), dan modal budaya (keterampilan ritual, retorika).

Kata *ta'zīm* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *'azzama-yu'azzimu-ta'zīman* yang berarti memuliakan atau mengagungkan. Dalam konteks pendidikan Islam, *ta'zīm* dipahami sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan terhadap figur yang memiliki otoritas moral dan keilmuan, terutama guru atau kiai. Dalam tradisi pesantren, penghormatan ini tidak sekadar dimaknai sebagai sikap emosional, melainkan sebagai bagian integral dari etika keilmuan yang menopang transmisi ilmu (Dhofier, 2011). Dengan demikian, *ta'zīm* memiliki dimensi normatif sekaligus institusional dalam membangun relasi antara santri dan kiai.

Sikap *ta'zīm* dalam praktiknya berkaitan erat dengan proses pembelajaran santri. Literatur klasik pendidikan Islam menegaskan bahwa penghormatan kepada guru tidak dimaksudkan untuk membatasi daya kritis murid, melainkan untuk menata etika interaksi agar berlangsung dalam koridor adab yang benar (Al-Zarnuji, 2003). Dalam *Ta'lim al-Muta'allim*, dijelaskan bahwa murid hendaknya berbicara dengan sopan, tidak menyela, serta tidak mempermalukan guru di hadapan umum. Prinsip serupa juga dapat ditemukan dalam *Hidayat al-Hidayah* karya Al-Ghazali (2005), yang menekankan bahwa keberkahan ilmu sangat bergantung pada kemurnian niat dan penghormatan murid kepada gurunya. Dengan demikian, *ta'zīm* dipahami sebagai bagian dari akhlak, karena ia merepresentasikan kesadaran moral dalam relasi pedagogis.

Dalam teks-teks tersebut, adab murid kepada guru dijabarkan secara rinci, antara lain memberi salam ketika berjumpa, tidak berbicara sia-sia, bertanya dengan sopan tanpa maksud menguji atau menentang, serta menegur kesalahan guru dengan lembut dan penuh kebijaksanaan (Al-Zarnuji, 2003; Al-Ghazali, 2005). Murid juga dianjurkan untuk tidak bercanda berlebihan, tidak bertanya ketika guru dalam keadaan letih, dan tidak menunjukkan gestur yang kurang sopan seperti berdiri tanpa keperluan mendesak.

Prinsip ini menunjukkan bahwa penghormatan bukanlah bentuk kultus individu, melainkan tata krama yang menjaga kehormatan ilmu dan proses pembelajarannya.

Adab lainnya meliputi larangan berjalan di depan guru tanpa alasan mendesak, duduk di tempat guru, memulai percakapan tanpa izin, serta menjaga prasangka baik (*ḥusn al-ẓān*) terhadap perilaku guru (Al-Zarnuji, 2003). Dalam tradisi pesantren, penghormatan kepada guru juga diperluas kepada keluarga dan kerabatnya sebagai bentuk penghargaan atas jaringan sosial yang menopang transmisi ilmu (Dhofier, 2011). Kepatuhan terhadap perintah guru selama tidak bertentangan dengan ajaran agama dipandang sebagai sarana memperoleh rida dan keberkahan ilmu.

Dalam perspektif sosiologi pendidikan Islam, praktik *ta'ẓīm* dapat dipahami sebagai habitus, yakni pola disposisi yang dipelajari, direproduksi, dan diwariskan dalam struktur sosial pesantren (Bourdieu, 1990). Disiplin adab menegaskan diferensiasi peran antara guru dan murid, sehingga penghormatan tidak sekadar formalitas, melainkan mekanisme simbolik yang menjaga legitimasi institusi. Studi etnografi tentang pesantren menunjukkan bahwa ritual sehari-hari seperti mencium tangan kiai, menjaga jarak duduk, dan penggunaan bahasa halus mereproduksi subordinasi simbolik sekaligus memperkuat kohesi komunitas (Turmudi, 2006; Hefner, 2009). Dengan demikian, *ta'ẓīm* tidak hanya memiliki makna teologis dan etis, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempertahankan struktur otoritas dan solidaritas dalam lingkungan pesantren.

Tuduhan feodalisme: analisis kritis

Istilah “feodalisme” kerap dipakai dalam kritik publik terhadap pesantren ketika muncul praktik pewarisan kekuasaan keluarga, penutupan akses terhadap akuntabilitas, atau perlakuan tak proporsional terhadap kritik internal. Namun, membandingkan pesantren secara langsung dengan sistem feodal historis Eropa berisiko reduksionis. Feodalisme merujuk pada hubungan patron-vasal berbasis tanah, hak milik, dan struktur negara-feodal; pesantren secara historis berbeda, karena otoritas kiai juga bersandar pada legitimasi keagamaan dan jaringan keilmuan (*sanad*), meskipun beberapa elemen patrimonial (pewarisan jabatan keluarga, kontrol sumber daya) memang ada. Dengan kata lain, ada aspek yang feodalistik dalam praktik tertentu, tetapi bukan makna feodalisme total yang menutup konteks religio-kultural pesantren.

Setiap Kiaikiai besar kebanyakan telah memiliki sebuah pesantren yang santrinya banyak dan datang dari berbagai daerah di pelosok Nusantara. Di mana pesantren adalah tempat satu-satunya yang dipercaya masyarakat Islam di Indonesia untuk menimba ilmu agama, dan kiai-kiai lah yang memimpin seluruh aspek kehidupan pesantrennya. Pesantrennya adalah seseorang yang dianggap paling mumpuni di bidang agama secara mutlak akan menjadi orang yang dinomorsatukan dalam hal urusan yang menyangkut keagamaan.

Pada mereka yang sangat dihormati, para santri yang umumnya tak berpendidikan, tak mampu, atau bahkan tak terpikir sama sekali untuk menciptakan *counter-culture*, bahkan jika ada yang memikirkannya, maka tak akan ada yang berani mengatakannya karena takut kualat, mungkin hanya sesama kiai-kiai saja lah yang ada semacam “watowaashou bil haqqi wa tawaashou bisshobri” (saling berwasiat dengan benar dan sabar). Dan sebagai akibatnya mereka menemukan diri mereka dalam situasi tanpa alternatif penerimaan secara pasrah atas hegemoni makna yang dilakukan kaum yang dihormati. Oleh karena itu, akan terbentuk sistem sosial budaya tersendiri yang ditandai oleh adanya hierarki nilai yang memisahkan secara tegas hak-hak sosial budaya para kiai dari santri dan masyarakat kebanyakan. Walau diselingi dengan sedikit konflik dan perseteruan sesama mereka, persahabatan dan usaha mempertalikan hubungan darah di antara sesama kiai-kiai telah turut memperkuat dominasi wacana tersebut. Dengan tujuan untuk dapat menjadi pengganti sebagai pimpinan, dalam lembaga-lembaga pesantren mereka. Dengan cara ini, para kiai-kiai saling terjalin dalam ikatan kekerabatan yang intensitas tali temali sangat kuat. Semakin masyhur kedudukan seorang kiai, semakin luas tali kekerabatannya dengan kiai-kiai yang lain. Tidaklah terlalu berlebih-lebihan untuk disimpulkan bahwa kepemimpinan pesantren di Jawa telah menjadi hak yang agak terbatas bagi kelompok-kelompok kerabat tertentu yaitu keluarga-keluarga kiai

Fenomena feodalisme yang ditemukan dalam penelitian mengindikasikan adanya ketergantungan santri terhadap kiai secara berlebihan. Agar terhindar dari masalah ini, disarankan penerapan sistem partisipatif yang melibatkan santri senior dalam pengambilan keputusan dan kegiatan pembelajaran (Syarif & Hannan, 2020). Jika struktur feodal sudah terbentuk, peneliti menemukan bahwa adaptasi bertahap melalui peningkatan tanggung jawab santri dapat mengurangi dominasi absolut tanpa mengurangi penghormatan terhadap kiai. Pendekatan ini juga membantu menyeimbangkan tradisi penghormatan dengan prinsip demokrasi internal. Dengan langkah ini, pesantren dapat tetap mempertahankan tradisi sambil mendorong perkembangan kapasitas kepemimpinan santri (Sa’dan, 2022). Beberapa studi empiris dan argumentasi NU menjelaskan bahwa tuduhan feodalisme sering kali berdasar pada fenomena-fenomena lokal dan bukan sifat inheren seluruh sistem pesantren; kritik perlu pembuktian empiris dan perbandingan komparatif antarpesantren.

Fenomena gus-gusan: asal, bentuk, dan implikasi sosial

Dalam beberapa tahun terakhir, ruang publik Islam di Indonesia diramaikan oleh munculnya fenomena yang populer disebut “Gus-gusan”, yaitu tren penggunaan gelar “Gus” oleh sejumlah individu yang tidak selalu memiliki latar belakang pesantren atau garis keturunan kiai. Fenomena ini menimbulkan beragam respons, mulai dari penerimaan yang wajar hingga kritik tajam terhadap banalitas simbol keulamaan.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: siapa sebenarnya yang layak disebut “Gus”? Apakah semata-mata karena faktor keturunan kiai, kedalaman ilmu, pengaruh sosial, atau gabungan dari ketiganya? Tulisan ini berupaya menelusuri akar historis dan sosiologis dari gelar “Gus”, sekaligus menelaah dinamika perubahan maknanya dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia kontemporer. Melalui pendekatan analisis kultural dan keagamaan, tulisan ini hendak mengembalikan pemahaman yang proporsional tentang posisi “Gus” sebagai simbol otoritas moral dan spiritual, bukan sekadar label sosial yang mudah disematkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa kemuliaan yang dilekatkan pada seorang Gus dalam tradisi pesantren tidak semata-mata ditentukan oleh capaian intelektual personalnya. Sejumlah studi tentang kultur pesantren menunjukkan bahwa gelar tersebut pada mulanya merupakan bentuk penghormatan sosial terhadap jasa dan kontribusi ayahnya sebagai seorang kiai dalam bidang keilmuan, dakwah, dan pengabdian kepada umat (Dhofier, 2011; Turmudi, 2006). Dalam kajian historis yang dimuat dalam *Journal of Islamic History* dijelaskan bahwa penyebutan “Gus” dalam tradisi pesantren Jawa berakar dari sapaan “Bagus” yang digunakan untuk menyebut putra kiai, yang kemudian berkembang sebagai simbol penerus tradisi keilmuan dan spiritualitas pesantren. Dengan demikian, secara sosiologis, gelar Gus tidak hanya berfungsi sebagai penanda genealogis, tetapi juga sebagai simbol legitimasi dalam struktur sosial pesantren yang sarat dengan nilai simbolik dan kultural (Muhtarom, 2005).

Namun demikian, berbagai pandangan ulama dan pemikir Islam menegaskan bahwa gelar tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai warisan biologis. Seorang Gus, dalam perspektif normatif keilmuan Islam, dipandang seharusnya mampu merepresentasikan nilai-nilai keilmuan, adab, dan keteladanan yang menjadi ruh dari tradisi pesantren. Dalam kerangka etika Islam klasik, kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh nasab semata, melainkan oleh kualitas akhlak dan amal saleh (Al-Ghazali, 2005). Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din* menekankan bahwa kebanggaan terhadap keturunan tanpa diiringi integritas moral dan amal nyata merupakan bentuk kesia-siaan spiritual. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip umum dalam literatur keislaman bahwa legitimasi moral harus dibangun melalui kapasitas personal dan pengabdian sosial (Hefner, 2009).

Penekanan terhadap kesesuaian antara gelar dan kapasitas pribadi juga tercermin dalam wacana kontemporer ulama pesantren. Dalam beberapa kajian tentang otoritas keagamaan di Indonesia, ditegaskan bahwa gelar kehormatan seperti kiai dan Gus memiliki dimensi epistemik dan moral yang tidak dapat dilepaskan dari kompetensi keilmuan (Burhanudin, 2012). KH. Thaifur Ali Wafa, misalnya, dalam salah satu karyanya mengingatkan bahwa penyematan gelar kiai kepada individu yang tidak memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dapat menurunkan nilai simbolik gelar tersebut. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran terhadap inflasi simbolik dalam

tradisi pesantren, yang berpotensi mengaburkan makna substantif gelar sebagai representasi ilmu dan keteladanan.

Kritik terhadap perluasan penggunaan gelar kehormatan tanpa landasan kelayakan juga dapat ditemukan dalam khazanah ulama klasik. Al-Zamakhsyari dalam komentarnya terhadap praktik sosial pada masanya mengkritik pemberian gelar-gelar mulia kepada individu yang tidak memiliki kapasitas moral dan intelektual yang memadai. Sikap kritis tersebut menunjukkan bahwa dalam tradisi Islam, gelar kehormatan bukan sekadar simbol sosial, melainkan mengandung tanggung jawab etis dan intelektual. Dalam konteks kekinian, fenomena yang populer disebut sebagai “gus-gusan” dapat dipahami sebagai bentuk pergeseran legitimasi religius, terutama ketika gelar tersebut dilekatkan tanpa dasar genealogis maupun keilmuan yang kuat (Nurhamidin dkk., 2025; Santoso, 2022). Dengan demikian, persoalan ini bukan semata-mata isu budaya, melainkan juga menyangkut transformasi otoritas keagamaan dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Teori Kharismatik

Teori kharismatik digagas oleh Max Weber untuk menjelaskan kepemimpinan individu dan pengaruhnya dalam kelompok masyarakat. Menurut Max Weber, kharisma adalah keistimewaan khusus yang dibentuk melalui status, pengaruh, dan jabatan yang bisa memengaruhi masyarakat melalui kekuatan kepribadian, karakter yang cerdas, visi yang terang, serta kemampuan retorika yang kuat. Weber menjelaskan bahwa kharisma bisa memengaruhi individu dan kelompok dalam berbagai konteks, baik itu politik, agama, maupun organisasi. Pemimpin atau tokoh yang mempunyai daya dan aura kharisma yang kuat, bisa memobilisasi dan menentukan arah pandang para pengikutnya. Bagi Weber, kharisma sendiri adalah hasil persepsi dari para pengikut dan loyalis mengenai atribut dan kualitas kepemimpinan dari tokoh-tokoh kharismatik yang ada. (Fauzi dan Kasno, 2023). Menurut Asri dkk. (2025) menjelaskan bahwa teori kharismatik merupakan sebuah teori yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan kepemimpinan seorang tokoh masyarakat muncul bukan berdasarkan tradisi maupun aturan formal, melainkan lebih kepada persepsi para pengikutnya bahwa seorang pemimpin diberkahi oleh kekuatan supranatural dan kemampuan memimpin yang baik. Ditambahkan oleh Pradana (2020) yang mengambil pendapat dari Max Weber bahwa kharisma yang ada pada seorang tokoh agama adalah kekuatan personal yang bisa menciptakan relasi yang kuat antara pemimpin dengan bawahannya.

Dalam kedudukannya di tengah masyarakat, seorang tokoh agama yang dikultuskan tidak terlepas dari adanya dukungan moral dan finansial dari para pengikutnya. Para pengikutnya memandang sosok junjungannya sebagai orang yang penuh wibawa dan kharisma. Menurut Asyha (2022), para pengikut yang dalam konteks ini adalah tokoh agama akan memosisikan diri mereka sendiri untuk menuruti keinginan-keinginan pemimpin dalam segala hal. Sementara seorang tokoh agama yang

kharismatik akan menunjukkan dominasi dan kontrolnya atas publik pendukungnya melalui keunggulan pribadi dan hegemoninya atas komunitas sosial.

Lewat karisma yang memukau, seorang tokoh agama mampu menguasai dan memanipulasi orang lain secara psikologis maupun emosional, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menciptakan hubungan antarpersonal yang erat dan bertujuan agar orang tersebut bergantung kepadanya, sehingga hal ini menciptakan tali hubungan yang kuat untuk mengikat individu menjadi pengikut dengan kesetiaan dan kepatuhan yang tinggi pada tokoh agama tersebut.

Teori interaksionisme simbolik

Teori interaksionisme simbolik menerangkan mengenai pentingnya penggunaan simbol-simbol dalam interaksi sosial untuk menciptakan makna dan realitas sosial dari kehidupan sehari-hari. Teori ini lebih berfokus pada proses seorang individu dan kelompok masyarakat dalam memproduksi makna-makna melalui interaksi dan simbol yang digunakan serta menghubungkan semua makna itu sehingga bisa menjadi satu pemahaman yang utuh (Romli & Nashihin, 2024) sedangkan menurut Kamilia & et al (2024) menjelaskan bahwa teori interaksionisme simbolik merupakan pendekatan sosiologi yang digagas oleh George Herbert Mead yang kemudian dikembangkan oleh Herbert Blumer yang menjelaskan bahwa makna terbentuk lewat interaksi sosial melalui penggunaan simbol-simbol yang ada namun dapat berubah berdasarkan penafsiran dari individu masing-masing. Agama berperan dalam menghasilkan simbol-simbol dan makna yang kemudian diserap oleh orang-orang sehingga memengaruhi pola pemikiran dan tindakan mereka dalam berinteraksi secara sosial. (Akmir, et al, 2025). Dalam konteks pengkultusan terhadap tokoh agama, teori ini membantu dalam menjelaskan bagaimana pola interaksi struktural antara pemimpin agama dengan pengikutnya bisa menciptakan makna yang khas dan beragam melalui penggunaan simbol-simbol seperti, tindakan berjabat tangan dengan tokoh agama, bersimpuh di hadapan tokoh agama, serta melontarkan kalimat pujian kepada tokoh agama, di mana semua simbol tersebut merupakan representasi dari penghormatan dan pengagungan dari para pengikut terhadap sosok yang dikultuskan. Interaksi secara intens antara para pengikut dengan tokoh agama telah melahirkan makna-makna melalui penggunaan simbol-simbol yang mewakili budaya penghormatan yang sudah berjalan begitu lama dan mengkristalisasi menjadi sebuah tradisi yang mutlak.

Bagi para pengikut tokoh agama, gelar dari seorang gus, kiai, habib, pendeta, dan lainnya bukan sebatas julukan atau gelar semata. Namun, lebih dari itu, gelar tersebut memiliki makna yang sakral dan melambangkan sebuah kedudukan yang berada di kasta sosial yang tinggi dan bersifat eksklusif yang tidak semua orang bisa memilikinya. Hal ini menjadikan orang-orang merasa segan dan memandang bahwa para tokoh agama mempunyai kedudukan tersendiri yang berbeda dari kebanyakan

orang. Para pengikut akan memaknai simbol-simbol kebesaran dari tokoh pemimpin mereka sebagai bagian dari identitas kolektif kelompok yang sakral dan suci serta patut diperjuangkan dan dipertahankan.

5. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa relasi kuasa dan hierarki sosial di pesantren merupakan konstruksi historis, kultural, dan simbolik yang membentuk otoritas keagamaan secara simultan. Pesantren sebagai institusi pendidikan Islam tradisional menempatkan kiai pada posisi sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi. Legitimasi kiai bersumber dari akumulasi modal keagamaan, simbolik, jaringan sosial, garis genealogis, serta persepsi kharisma yang dilekatkan oleh masyarakat. Dalam perspektif Weberian, otoritas tersebut bersifat karismatik sekaligus tradisional, sehingga ketaatan santri tidak hanya didasarkan pada rasionalitas formal, tetapi juga pada dimensi emosional dan spiritual. Struktur ini menghasilkan pola hierarkis di mana kiai berperan bukan hanya sebagai pendidik, melainkan juga sebagai pemegang wacana, pengatur norma, dan simbol moral komunitas. Hierarki tersebut diperkuat oleh tradisi *ta'zīm*, yakni sistem adab yang diwariskan dan menjadi habitus santri dalam berinteraksi dengan kiai. *Ta'zīm* mengatur etika berbicara, bersikap, dan memposisikan diri, serta berfungsi menjaga ketertiban dan kohesi komunal. Namun, dalam kondisi tertentu, tradisi ini juga berpotensi memperkuat ketimpangan relasi kuasa apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas internal. Kepatuhan yang lahir dari penghormatan dapat berkembang menjadi pola patrimonial yang sulit dikritisi.

Isu feodalisme muncul sebagai kritik terhadap kecenderungan pewarisan kepemimpinan yang terpusat pada keluarga kiai. Meskipun tidak identik dengan feodalisme klasik, beberapa praktik menunjukkan kemiripan dalam dominasi simbolik dan reproduksi status melalui garis keturunan. Meski demikian, pesantren tidak bersifat monolitik; banyak yang mengembangkan kepemimpinan partisipatif dan membuka ruang dialog, sehingga variasi praktik tetap signifikan. Fenomena “gus-gusan” memperlihatkan pergeseran makna otoritas keagamaan di era digital. Gelar “Gus” yang awalnya merupakan penghormatan genealogis kini kerap digunakan tanpa dasar keilmuan atau keterikatan pesantren. Media sosial berperan dalam membentuk popularitas instan, sehingga legitimasi dapat muncul dari eksposur publik, bukan dari sanad ilmu atau kedalaman spiritual. Hal ini menandakan transformasi pola legitimasi dari tradisi pesantren menuju arena digital yang lebih cair dan kompetitif, sekaligus mencerminkan komodifikasi simbol keagamaan.

Penelitian ini menekankan pentingnya menempatkan gelar kehormatan secara proporsional, berbasis kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kontribusi sosial, bukan semata keturunan. Secara keseluruhan, relasi kuasa di pesantren bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan. Tradisi dan kharisma tetap dominan, namun modernitas menghadirkan tuntutan transparansi dan partisipasi. Pesantren perlu mengintegrasikan

nilai adab dengan mekanisme akuntabilitas agar tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan sosial.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Tusi (t.t.) *Ihya' 'Ulum al-Din*. Juz 3. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Afriyanto, D., & Anandari, A. A. (2023). Agama Sebagai Inspirasi Perdamaian dan Anti Kekerasan Pada Masyarakat Multikultural Perspektif Islam. *Jurnal Sosiologi Agama*, 19(1) 79-96. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v19i1.4424>
- Al-Ghazali (2005) *Hidayat al-Hidayah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zarnuji, B. (2003) *Ta'lim al-Muta'allim Tarīq al-Ta'allum*. Beirut: Dar Ibn Kathir.
- Anjarahmi, M. D., & Alamin, T. (2023). Peran Tokoh Agama dalam Meningkatkan Spiritualitas Masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. *Journal of Islamic and Social Studies*, 1(1), 15–24. <https://doi.org/10.30762/jiss.v1i1.1337>
- Assa'idi, S. (2021). The Growth of Pesantren in Indonesia as the Islamic Venue and Social Class Status of Santri. *Eurasian Journal of Educational Research*, (93), 425–440. <https://doi.org/10.14689/ejer.2021.93.21>
- Agus Faisal Asyha. 2022. Kontekstualisasi Konsep Kepemimpinan Kharismatik Dalam Islam. *Islamida Journal of Islamic Studies* 1(2), 102-117. <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/islamida/article/view/420>.
- Bourdieu, P. (1990). *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.
- Burhanudin, J. (2012) *Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Jakarta: Mizan.
- Dhofier, Z. (2011) *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, A., & Kasno, K. (2023). Karisma Gus Azmi di Kalangan Jamaah Milenial dalam Shalawat Syubbanul Muslimin Perspektif Max Weber. *Journal of Ushuluddin and Islamic Thought*, 1(1), 115–126. <https://doi.org/10.15642/juit.2023.1.1.115-126>
- Haryono, S. D. (2023). Identitas Hibrid Santri Mahasiswa (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Musthofa Ngeboran, Kec. Sawit, Kab. Boyolali). *Prosiding Annual Symposium on Pesantren Studies (AnSoPS)*, 2, 132–148. <https://proceeding.iainkediri.ac.id/index.php/ansops/article/view/52>

-
- Hefner, R.W. (2009). *Making Modern Muslims: The Politics of Islamic Education in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Irawan, D. (2022). Fungsi dan Peran Agama dalam Perubahan Sosial Individu, Masyarakat. *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 125–135. <https://doi.org/10.37567/borneo.v2i2.1255>
- KH. Thaifur Ali Wafa al-Maduri (t.t.) *Bulughah al-Thullab fi Talkhish Fatawa Masyayikhi al-Anjab*. Madura: Maktabah Ambunten.
- Muhtarom, H.M. (2005) *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musaddad, A. (2023). Transformation of Islamic Boarding Schools as Islamic Education Institutions in Indonesia. *Journal of Islamic Education Research*, 4(1), 73–82. <https://doi.org/10.35719/jier.v4i1.319>
- Neliwati, N., Rizal, S., & Hemawati, H. (2022). Peranan Tokoh Agama dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v9i1.6233>
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). History and Development of Pesantren in Indonesia. *Jurnal Eduscience (JES)*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>
- Nurhamidin, B., Mokodenseho, S., Mokodompit, H., Bahansubu, A., & Rumondor, P. (2025). Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital: Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial. *AL-MUQADDIMAH: Journal of Educational and Religious Perspectives*, 1(1), 39–48. <https://jurnal-muqaddimah.or.id/index.php/Al-Muqaddimah/index>
- NU Online (2024) KH Afifuddin Muhajir Ungkap Keistimewaan Panggilan “Gus” Dibanding Titel Lain, Diakses 5 November 2025. <https://www.nu.or.id/nasional/kh-afifuddin-muhajir-ungkap-keistimewaan-panggilan-gus-dibanding-titel-lain-qkWAZ>
- Okarniatif, A. A. M., Syukur, M., & Ismail, A. (2024). Ajaran Agama Menciptakan Perubahan Sosial: Refleksi dari Pemikiran Karl Marx. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 8(6), 380–391. <https://sejurnal.com/pub/index.php/jikm/article/view/2258>
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kiai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 12(1), 1-14. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v12i1.48063>

- Pradana, M. Y. A. (2020). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama dalam Hegemoni Pemilukada 2020. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2), 417–438. <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2418>
- Putri, A. (2023). Peran Antropologi dalam Mempelajari Pengaruh Agama terhadap Perubahan Sosial. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(1), 13–20. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i1.6>
- Riady, A. S. (2021). Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.22373/jsai.v2i1.1199>
- Romli, A., & Nashihin, M. (2024). Urgensi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Pendidikan Agama Islam. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 11–26. <https://doi.org/10.58518/darajat.v7i1.2775>
- Santoso, J. (2022). Media Baru dan Otoritas Keagamaan Generasi Milenial Muslim. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 17(2), 181–204. <https://doi.org/10.47651/mrf.v17i2.196>
- Shiddiq, M. A. (2022). Pesantren Tegalsari: Antara Eksistensi dan Dekadensi. *Journal of Islamic History*, 2(2), 101–116. <https://doi.org/10.53088/jih.v2i2.380>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104, pp. 333–339. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suhartini, R. (2021) *Agama dan Masyarakat dalam Perspektif Sosiologi Agama*. Jakarta: CV. Dimar Jaya.
- Turmudi, E. (2006). *Struggling for the Umma: Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang*. Canberra: ANU Press.
- Zakiyah, M. (2018). Makna Sapaan di Pesantren: Kajian Linguistik Antropologis. *Leksema: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 3(1), 11–22. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v3i1.1014>